



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Rohana Kudus - P A I N A N

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 08 /BKPol-PS/2023**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021 – 2026**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 – 2026, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026, dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Polittk Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:
1. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan Kegiatan Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala Badan,

HARDI DARMA PUTRA, S.H,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670901198602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 900/ 08 /BKPol-PS/2023
Tanggal : Januari 2023
Tentang : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

PEJABAT : ESSELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	N/A	N/A	65 (B)	65 (B)	65 (B)	65 (B)
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (71.8)	BB (72)	A (81)	A (81.2)	A (81.5)	A (82)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	N/A	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	%	80	80	80	80	100	100
		Cakupan Peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Politik	%	N/A	N/A	30	30	35	35

PEJABAT : ESSELON III

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip Badan Kesbangpol	Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol	Tanpa Satuan	BB (71.8)	BB (72)	A (81)	A (81.2)	A (81.5)	A (82)
2.	Meningkatnya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawaian	Tanpa Satuan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
3.	Meningkatnya Inovasi	Jumlah Inovasi Per Bidang (1)	Inovasi	N/A	1	3	3	3	3
4.	Meningkatkan Peran Forum Strategis Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik	Persentase Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti	%	80	80	80	80	100	100
5.	Meningkatnya Fasilitasi tentang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Kali	N/A	2	2	3	4	5
6.	Menurunnya Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyalahgunaan	%	N/A	3	2	2	1	1

		Narkoba							
		Persentase Penurunan Kasus Kenakalan Remaja	%	N/A	N/A	3	2	1	1
7.	Meningkatnya Peran Lembaga Politik/Ormas untuk Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diterima dari Perwakilan Partai Politik	%	N/A	N/A	55	60	60	65

KINERJA OPERASIONAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)
2.	Meningkatnya Kualitas Data Kinerja Badan kesbangpol	Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola	Dokumen	N/A	3	3	4	4	5
3.	Meningkatnya Layanan Kepegawaian	Persentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100

4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Surat Menyurat	Persentase Layanan Surat Menyurat Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100
5.	Meningkatnya SDM Kesbangpol	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri	Kali	N/A	N/A	1	1	1	1
6.	Informasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Data Konflik	Konflik	5	10	10	10	10	10
7.	Meningkatnya Masyarakat yang Mengikuti Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Orang	N/A	500	500	500	500	500
8.	Meningkatkan Fasilitas Pencegahan dan Pengawasan PEKAT	Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat	Kali	N/A	1	2	2	3	3
		Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pekat	Kali	N/A	1	1	1	1	1
9.	Meningkatkan Efektivitas Kelembagaan Demokrasi	Persentase Lembaga Politik (Partai/Ormas) yang sesuai dengan Regulasi	%	80	80	80	80	85	85

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

Agar seluruh stakeholder Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki presepsi yang sama terhadap IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah sebagai Assesor sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB no 26 tahun 2020.
Formula	: Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah
Sumber Data	: Laporan hasil penilaian Reformasi Birokrasi
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formula	: Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber Data	: Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Nilai Kematangan Inovasi PD

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Nilai kematangan inovasi marupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri.
Formula	: Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber Data	: Aplikasi pengentrian kriteria inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum pada saat, maupun sesudah terjasi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
Formula	: $\frac{\sum \text{potensi konflik yang terdeteksi, terbahas dan tertangani dalam rakor kewaspadaan dini masyarakat (KDM)}}{\text{X 100\%}}$

Sumber Data : Σ konflik yang dilaporkan
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

5. Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik

Level dalam Resntra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Oprasional : Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik

Formula :
$$\frac{\Sigma \text{Kelompok masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik}}{\Sigma \text{Kelompok masyarakat Sasaran Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik}} \times 100\%$$

Sumber Data : Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6. Nilai Komponen Perencanaan pada Evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol

Level dalam Resntra : Kinerja Taktikal

Definisi Oprasional : Nilai komponen perencanaan pada evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol merupakan nilai komponen perencanaan yang terdapat pada LHE LKj.

Formula : Nilai komponen perencanaan pada LHE LKj

Sumber Data : Inpektorat Daerah

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

7. Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawain

Level dalam Resntra : Kinerja Taktikal

Definisi Oprasional : Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawain merupakan level kepuasan terhadap layanan kepegawaian pada Badan Kesbangpol

Formula : Tingkat perhitungan rata-rata kepuasan terhadap layanan kepegawaian

Sumber Data : Bagaian Umum Kepegawaian

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8. Jumlah Inovasi Per Bidang (1)

Level dalam Resntra : Kinerja Taktikal

Definisi Oprasional : Banyaknya inovasi yang dihasilkan oleh bidang

Formula : Jumlah inovasi

Sumber Data : Bidang pada Badan Kesbangpol

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

9. Persentase Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti

Level dalam Resntra : Kinerja Taktikal

Definisi Oprasional : Persentase konflik yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol

Formula :
$$\frac{\text{Jumlah Konflik yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Konflik}} \times 100\%$$

Sumber Data : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Penanggung jawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

10. Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Level dalam Resntra : Kinerja Taktikal

Definisi Oprasional : Banyaknya Penyelenggaraan Pendidikan

	Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Formula	: Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan partai politik
Sumber Data	: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

11. Persentase Penurunan Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Merupakan Persentase Penurunan Kasus Penyalahgunaan Narkoba
Formula	: $\frac{(\text{Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun Berjalan}) - (\text{Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun Lalu})}{(\text{Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun Lalu})} \times 100\%$
Sumber Data	: Polres Pesisir Selatan
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

12. Persentase Penurunan Kasus Kenakalan Remaja

Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Merupakan Persentase Penurunan Kasus Kenakalan Remaja
Formula	: $\frac{(\text{Jumlah Kasus Kenakalan Remaja Tahun Berjalan}) - (\text{Jumlah Kasus Kenakalan Remaja Tahun Lalu})}{\text{Jumlah Kasus Kenakalan Remaja Tahun Lalu}} \times 100\%$
Sumber Data	: Satuan Polisi Pamong Praja
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

13. Persentase Aspirasi Masyarakat yang diterima dari Perwakilan Partai Politik

Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Merupakan Aspirasi Masyarakat yang diterima dari Perwakilan Partai Politik
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Aspirasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Aspirasi yang diajukan Masyarakat}} \times 100\%$
Sumber Data	: Sekwan dan Bappedalitbang
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

14. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu

Level dalam Resntra	: Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	: Merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait
Formula	: Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari instansi terkait
Sumber Data	: Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

15. Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola

Level dalam Resntra	: Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	: Banyaknya Dokumen Data Sektoral yang dikelola
Formula	: Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola
Sumber Data	: Bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

16. Persentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu

Level dalam Resntra	: Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	: Merupakan dokumen segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan

Formula	:	Kepegawaian yang disusun Tepat Waktu $\frac{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Keseluruhan Dokumen Kepegawaian}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

17. Persentase Layanan Surat Menyurat Sesuai SOP

Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Merupakan acuan penerapan langkah-langkah alur surat masuk baik internal maupun eksternal secara tertib dan teratur dalam layanan Surat menyurat
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah Layanan Surat Menyurat Sesuai SOP}}{\text{Jumlah Layanan Surat Menyurat}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

18. Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri

Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Pelatihan kantor sendiri dilakukan untuk peningkatan kapasitas sdm pegawai Badan Kesbangpol.
Formula	:	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri
Sumber Data	:	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

19. Jumlah Data Konflik

Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Merupakan kegiatan pendataan pengumpulan data konflik yang ada di Pesisir Selatan
Formula	:	Jumlah Data Konflik
Sumber Data	:	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

20. Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Merupakan Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Formula	:	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Sumber Data	:	Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

21. Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat

Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan Pekat
Formula	:	Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat
Sumber Data	:	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

22. Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pekat

Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengawasan Pekat
Formula	:	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pekat
Sumber Data	:	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

23. Persentase Lembaga Politik (Partai/Ormas) yang Sesuai dengan Regulasi	
Level dalam Resntra	: Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	: Merupakan Partai/Ormas yang terdaftar di Kemenkumham dan sesuai dengan standar yang ada.
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Partai/Ormas yang sesuai dengan regulasi}}{\text{Jumlah Partai/Ormas yang ada di pesisir Selatan}} \times 100\%$
Sumber Data	: Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670901198602 1 001